

## Ketua DPRD: Pemekaran Wilayah Dibutuhkan Kabupaten Bogor

**CIBINONG (IM)**- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Rudy Susmanto mengatakan pemekaran wilayah Calon Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bogor sendiri secara administrasi sudah selesai. "Tapi secara persiapan infrastruktur kita masih berupaya mendorong, contoh, sekarang baik dari seluruh intansi yang ada di Kabupaten Bogor terus mendorong kantor BPN Perwakilan wilayah, yang sebentar lagi akan menjadi BPN Bogor Timur," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Selain mendorong pemekaran di Bogor Timur, lanjut Rudy, pihaknya pun turut mendorong pemekaran wilayah Bogor Barat. "Di Bogor barat pun kita membuka kantor pertanahan, makanya tahapannya sama kita dorong juga untuk bersiap bersama-sama, tinggal nanti su-

paya saat moratorium dicabut atau diizinkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran semuanya sudah siap," tuturnya.

Menurut politisi asal partai Gerindra ini, terus mendorong kedua wilayah untuk mekar menjadi Daerah Otonomi Baru. "Kita tidak berarti melepas beban, bahkan Bogor Timur merupakan pemberi PAD tertinggi di Kabupaten Bogor karena di sana sektor industri, dari sektor pertanian dan pertambangan adanya di Bogor barat, Bogor induk ini cuma wilayah perkotaan, mall, perumahan," paparnya.

Intinya, tegas Rudy, pemekaran ini tidak boleh memecahkan kegyuban Kabupaten Bogor. "Pemekaran ini bukan berarti memecahkan kita semua, tapi kita masih sama-sama wilayah Republik Indonesia dengan mekarnya beberapa wilayah tersebut, supaya kita lebih maksimal dalam mengurus masyarakat kita di wilayah Kabupaten Bogor," pungkasnya. ● **gio**

## Pemkab Purwakarta Dorong Pengembangan Wirausaha Batik

**PURWAKARTA (IM)**- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendorong pengembangan wirausaha batik dengan membangun sebuah rumah batik di Kecamatan Plered.

Bupati setempat Anne Ratna Mustika, di Purwakarta, kemarin mengatakan, sampai saat ini terdapat ratusan motif batik yang dikembangkan oleh masyarakat Purwakarta. "Jumlah desain motif batik saat ini ada lebih dari 200 yang diciptakan sebagai stimulasi program pengembangan batik di Purwakarta," katanya.

Di antaranya, motif air mancur Situ Buleud, motif manggis, motif maranggi, motif Waduk Jatiluhur, motif Waduk Cirata, motif ombak Cirata, dan motif bambu. Selain itu, ada juga motif Gunung Parang, motif Tajug Gede Cilandong, motif keramik, motif burung anis, motif nelayan,

motif air, dan lain-lain.

Oleh karena itu, ia menyampaikan, untuk mendorong terciptanya wirausaha batik di Purwakarta, saat ini sedang dibangun rumah batik di Kecamatan Plered. Rumah batik itu, nantinya akan menjadi role model dalam mengembangkan dan mengolah cipta ragam desain yang unik dan sesuai dengan khas Purwakarta. "Semoga dengan adanya rumah batik, masyarakat dapat mengenal batik khas Purwakarta," kata dia.

Selain sebagai upaya memperkenalkan batik khas Purwakarta, rumah batik itu juga dibangun agar batik khas Purwakarta mampu bersaing, baik di tingkat lokal, regional maupun global. Dengan demikian, diharapkan batik khas Purwakarta dapat menambah daftar panjang kekayaan kerajinan yang ada di Indonesia. ● **pur**



IDN/ANTARA

### KUNJUNGAN DELEGASI URBAN 20 KE KEBUN BURUAN SAE

Delegasi sejumlah negara peserta Konferensi Internasional Urban 20 (U20) melihat kolam ikan bioflok saat kunjungan ke urban farming Buruan Sae, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/8). Kunjungan delegasi tersebut guna melihat konsep isu ketahanan pangan mandiri warga melalui urban farming berbasis budaya di Kota Bandung sebagai salah satu rangkaian agenda presidensi G20 yang mengangkat isu perkotaan.

## Gerakan 'Bogor Berkebun' Dapat Apresiasi dari Forum Urban 20

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mendapat medali penghargaan dari Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Uni Eropa. Penghargaan itu diberikan karena Bima dianggap berhasil menciptakan ketahanan pangan mandiri pada masa pandemi Covid-19 lewat gerakan urban farming "Bogor Berkebun".

MUFPP adalah sebuah lembaga internasional yang concern terhadap isu-isu pangan. Saat ini lembaga tersebut tengah mengundangi sejumlah kepala daerah untuk menghadiri Forum Urban 20 (U20).

Bima menyebutkan, saat ini terjadi pertumbuhan signifikan terhadap jumlah kelompok tani di Kota Bogor sejak gerakan "Bogor Berkebun" diluncurkan di tengah krisis pandemi Covid-19. Tercatat, sudah ada 330 kelompok pertanian, peternakan, hingga perikanan yang lahir lewat "Bogor Berkebun".

Bima mengungkapkan, program itu tidak saja diikuti oleh petani, tapi juga generasi muda, mahasiswa, atau pelajar yang mengisi kegiatan

produktif di masa pandemi. "Selain untuk mengisi waktu, urban farming ini juga mampu menghasilkan pendapatan rupiah karena bisa menambah pendapatan bagi yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19," ungkap Bima, Kamis (4/8).

"Tahapan pasca-panennya juga kami pikirkan dengan melibatkan pihak lain sebagai penyaluran hasil panen, misalnya ada Toko Tani Indonesia, pasar tradisional, Asosiasi Pasar Tani, dan mobil tani keliling," sambung dia.

Bima berharap, gerakan urban farming ini bisa lebih masif lagi meski pandemi sudah perlahan melandai dan menuju situasi normal. Sebab, kata Bima, perlu ada regenerasi dan keterlibatan dari kaum milenial khususnya anak-anak muda.

"Saya juga menekankan secara khusus pentingnya anak-anak muda menekuni urban farming ini karena food producer perlu juga diregenerasi, bukan saja posisi-posisi pemerintahan dan pengusaha, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan yang kuat," kata dia. ● **gio**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### PENCUCIAN BENDERA MERAH PUTIH MASAL

Sejumlah pelajar melakukan hormat bendera saat pencucian bendera merah putih masal di kompleks SMK Bhumi Phala Parakan Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (4/8). Sedikitnya 3.400 pelajar SD, SMP dan SMA dari sejumlah sekolah mengikuti acara mencuci bendera merah putih massal untuk menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI sekaligus untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta NKRI.

## DPRD Minta Pemkot Bogor Jamin Pembangunan Masjid Agung Rampung

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menuturkan akan mengawasi ketat penggunaan anggaran dan pembangunan Masjid Agung agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan pengerjaan yang bisa merugikan masyarakat.

**BOGOR (IM)**- Anggaran pembangunan Masjid Agung yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 di DPRD Kota Bogor. Untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung, diketahui Pemkot Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp 39,2 miliar.

Padahal, pada tahun anggaran 2020 DPRD Kota Bogor telah menganggarkan Rp 15 miliar dan hanya terserap

Rp 6,6 miliar untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung. Lalu pada APBD 2021, DPRD Kota Bogor bersama TAPD menganggarkan Rp 31,4 miliar dan pada APBD 2022 ini dianggarkan Rp 26 miliar.

Atas adanya pengajuan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin pun meminta jaminan kepada Pemkot Bogor agar tahun depan menjadi tahun terakhir penganggaran Masjid Agung.

"Kami bukannya tidak mau menganggarkan. Tapi kalau berkaca tahun-tahun sebelumnya, kami selalu hanya

mendapat janji bahwa pembangunan akan selesai. Ini sudah terjadi sejak 2016, maka kami di DPRD meminta jaminan ke Pemkot Bogor bahwa tahun depan itu pembangunan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Jenal, Kamis (4/8).

Dia menyebutkan, anggaran Rp 39,2 miliar yang diajukan oleh Pemkot Bogor, diketahui akan digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi sebesar Rp 35 miliar, jasa konsultasi pengawasan Rp 1,2 miliar dan pengadaan perlengkapan masjid Rp 3 miliar.

Lebih lanjut, Jenal mengaku akan mengawasi ketat penggunaan anggaran dan pembangunan Masjid Agung agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan pengerjaan yang bisa merugikan masyarakat.

"Kalau terjadi kelalaian dalam pengerjaan kan yang dirugikan masyarakat. Maka kami di DPRD Kota Bogor akan mengawasi secara ketat penyelesaian masjid

agung ini," ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, juga menyampaikan DPRD menginginkan ada laporan tertulis yang menjelaskan proses perjalanan pembangunan Masjid Agung. Dia berharap tidak ada tumpang tindih pekerjaan antar-tahun yang sudah berjalan, sehingga anggarannya memang benar-benar efektif dan optimal.

"Kami minta laporan tertulis terkait pelaksanaan pembangunan sekaligus dengan rencana anggaran dan realisasinya. Jangan sampai, akhirnya memakan anggaran yang jauh lebih besar dibanding rencana awal akibat molornya pekerjaan tiap tahunnya. Seharusnya, pembangunan Masjid Agung ini dikerjakan melalui skema multiyears seperti yang telah disarankan DPRD di akhir 2021 lalu," ujarnya.

Selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar), Atang mendorong agar di APBD 2020 dianggarkan pembangunan Masjid Agung yang sempat

molor pada pembahasan awal, karena kita lihat sebelumnya tidak diusulkan. Namun, sayang anggaran tidak diserap maksimal.

"Di APBD 2021 dan 2022 juga kita bersepat anggarakan lagi. Sayangnya, pekerjaan tersebut tidak terulang lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan pembangunan Masjid Agung tahun anggaran 2022 akan tuntas pada 6 Desember 2022. Usai interior dan pemasangan granit selesai, lantai 2 masjid bisa digunakan untuk shalat berjamaah.

Selain itu, pekerjaan juga bisa berlanjut pada tahun anggaran 2023 yang meliputi pekerjaan fasade dan lainnya. Ia juga menargetkan pada 2023, proyek Masjid Agung yang sudah mulai dibongkar sejak 2016 silam ini bisa 100 persen selesai, serta kembali bisa digunakan untuk tempat beribadah dan salat berjamaah. ● **gio**

## Rapat Paripurna DPRD Kab. Bogor, Bahas Tiga Agenda

**BOGOR (IM)**- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (3/8).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto membahas tiga agenda. Tiga agenda yang menjadi pokok pembahasan di antaranya, penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2021.

Penyampaian dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran (KUA/PPAS) tahun anggaran 2023, serta penetapan keputusan DPRD terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) tahun 2022.

Iwan Setiawan mengatakan, pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terinci dilaksanakan dalam dua tahap. Pemeriksaan pertama dilaksanakan dari tanggal 28 Maret sampai 26 April 2022 dan tahap kedua dilaksanakan dari 17 Mei sampai dengan 1 Juli 2022.

"Pada tanggal 1 Agustus 2022 BPK telah secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian,"

kata Iwan.

Iwan menegaskan, saya minta kepada para kepala perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan untuk perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang.

"Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait agenda penetapan keputusan DPRD terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022, baik Raperda yang merupakan prakarsa Pemerintah," ujar Iwan yang juga politisi partai Gerindra. ● **gio**



IST

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat menyampaikan tiga agenda di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

## Pemkab Bogor, Raih Penghargaan Bidang KB Provinsi Jabar

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) meraih penghargaan kategori Pelayanan Sejuta Akseptor dengan capaian di atas 100 persen dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), di Hotel Mercure, Karawang, Selasa (2/8).

Pada momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan gebyar pelayanan kontrasepsi sejuta akseptor secara serentak di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Peringatan Harganas tingkat Jawa barat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) (PUS) dalam ber-KB.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin, disaksikan oleh Deputi KBKR BKKBN

Pusat dan Bupati Karawang yang secara langsung diterima oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati.

Nurhayati mengatakan, bersyukur berkat kerjasama yang terjalin dan kerja keras semua pihak, hari ini dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) dan orientasi penurunan angka kematian ibu melalui KB Pasca Persalinan (KBPP), Pemkab Bogor melalui DP3AP2KB mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dengan kategori Pelayanan Sejuta Akseptor Capaian diatas 100 persen.

"Momentum Harganas merupakan titik tolak dalam pembangunan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kontrasepsi KBPP juga sebagai upaya dalam penurunan stunting dari aspek kelahiran di Kabupaten Bogor," kata Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Nurhayati. ● **gio**

## Puluhan Pelajar Reaktif Covid-19, Tangsel Berlakukan PTM 50 Persen

**TANGSEL (IM)**- Pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, diterapkan 50 persen setelah adanya 23 pelajar dan satu guru reaktif Covid-19. Sebelumnya, pihak sekolah juga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 100 persen hingga Rabu (3/8) kemarin. "Benar, kemarin kami full PJJ, mulai hari ini PTM 50 persen," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMAN3 Tangsel, Liman, dikonfirmasi, Kamis (4/8).

Dia menyebutkan, pihaknya terpaksa menerapkan PJJ 100 persen, setelah adanya laporan orang tua siswa yang melaporkan bahwa anaknya positif Covid-19 pada akhir pekan kemarin. "Jadi kami sejak Sabtu 30 Juli sampai Rabu 3 Agustus PJJ. Setelah kami

tracing ada 22 siswa dan satu guru reaktif Covid-19 dan pemeriksaan swab antigen," terang dia.

Liman menyebutkan, 23 siswa reaktif Covid-19 itu berdasarkan hasil testing terhadap 90 siswa di kelas 1, 2 dan 3 SMAN3 Tangsel, pada pekan lalu. "Semua kelas kami testing, jadi merata di semua kelas ada siswa reaktif dan umumnya bergelaja ringan dan tanpa gejala. Mayoritas adalah anak-anak kelas 3," terang dia.

Dia menegaskan, akan kembali menerapkan PTM 100 persen, jika seluruh siswa yang dinyatakan reaktif telah sehat. Dan seluruh orang tua kembali mengizinkan. "Senin kita rencana PTM full, dengan melihat perkembangan siswa dan orang tua," jelas dia. ● **pp**